



**Kritik Politik Terhadap Penguasa dalam *Antologi Cerkak Telasih Wulan September* Karya Purwadmadi
(Kajian Sosiologi Sastra)**

Anggit Rakasiwi¹, Latif Nur Hasan²

^{1,2} Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
anggitrakasiwi.20033@mhs.unesa.ac.id¹, latifhasan@unesa.ac.id²

Abstrak:

Antologi *Cerkak Telasih Wulan September* ditulis oleh Purwadmadi menceritakan tentang kritik sosial. Kritik sosial yang ada di dalam Antologi *Cerkak Telasih Wulan September* sebagai sosial masyarakat dan negara di dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang sesuai dengan penelitian kritik sosial di dalam karya sastra adalah penelitian sosiologi sastra yang dijelaskan oleh Rene Wellek dan Austin Warren. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bentuk kritik politik. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah diharapkan bisa mengembangkan penelitian sastra Jawa modern dan bisa menambah wawasan kritik sosial terhadap penguasa di dalam karya sastra. Penelitian kritik sosial di dalam ACTWS menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data di dalam penelitian adalah ACTWS dan penelitian dahulu yang serupa. Data penelitian di penelitian ini adalah 14 cerpen yang termasuk kritik sosial terhadap penguasa dari 24 cerpen ACTWS. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik baca, semak, dan catat. Hasil penelitian adalah 1) kritik politik terhadap penguasa di dalam ACTWS berupa jabatan dan kekuasaan, disorganisasi pemerintahan, dan dinamika sosial politik. Kesimpulan penelitian adalah kritik politik sebagai kritik sosial yang berpengaruh kepada masyarakat di dalam ACTWS.

Kata Kunci: Kritik Sosial, Penguasa, Politik

Abstract:

The anthology Cerkak Telasih Wulan September written by Purwadmadi tells about social criticism. The social criticism contained in the Cerkak Telasih Wulan September Anthology is social for society and the state in everyday life. An approach that is appropriate to research on social criticism in literary works is research on the sociology of literature described by Rene Wellek and Austin Warren. The aim of the research is to explain forms of political criticism. The benefits that can be taken from this research are that it is hoped that it can develop research on modern Javanese literature and can increase insight into social criticism of the authorities in literary works. Social critical research in ACTWS uses qualitative research. The data source in the research is ACTWS and similar previous research. The research data in this study are 14 short

stories which include social criticism of the authorities from 24 ACTWS short stories. The data collection techniques used in this research were reading, checking and note-taking techniques. The results of the research are 1) political criticism of the authorities in ACTWS in the form of position and power, government disorganization, and socio-political dynamics. The research conclusion is that political criticism is a social criticism that influences society in ACTWS. Key words: social criticism, rulers, politics, economics, morals, culture.

Keywords: *Social Criticism, Authorities, Politics*

Pendahuluan

Sastrawan menciptakan karya sastra untuk menceritakan suatu kenyataan. Sastrawan menggunakan unsur estetis untuk menyampaikan kebenaran. Sastrawan menciptakan karya sastra dari kehidupan sehari-hari dan persoalan-persoalan sosial. Kehidupan manusia sering tergambar dalam karya sastra. Hasil karya sastra tercipta dari pemikiran dan batin Sastrawannya. Hasil tersebut diambil dari hubungan antar individu dengan masyarakat. Wellek dan Warren (Lutfiana Mayang Sumarti & Nursaid Nursaid, 2023) mengatakan ada tiga hal yang ditemukan untuk dapat mengkaji hubungan antara sastra dan masyarakat. Pertama, sosiologi sastrawan, profesi sastrawan, dan lembaga sastra. Kedua, isi karya sastra, tujuan dan hal-hal yang tersirat dalam karya sastra, serta kaitan karya sastra dengan persoalan sosial. Ketiga, pembaca dan dampak sosial karya sastra. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari karya sastra, melainkan harus dianalisis kaitannya dengan strukturnya. Tujuannya untuk dapat memahami struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa sastra sering disebut sebagai cermin masyarakat, dan disebut juga ungkapan perkawinan sang pencipta.

Kritik sosial digunakan oleh sastrawan sebagai bentuk kontrol sosial dalam kehidupan yang damai (Adiyanti & Agustiningsih, 2021). Pengarang menciptakan karya sastra yang penuh dengan konflik tentang kemasyarakatan melalui refleksi realitas (Mar'atus & Supratno, 2023). Kritik sosial berperan penting sebagai cermin permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan kritik sosial untuk membuat pembaca memahami permasalahan sosial dalam masyarakat melalui karya sastra. Rene Wellek dan Austin Warren (Andani et al., 2022) mengatakan karya sastra fokus pada refleksi kehidupan karena dalam persoalan sosial ditemukan konflik-konflik yang dikaji sebagai gejala sosial. Setiap karya sastra pasti mempunyai isu sosial yang diangkat pengarangnya. Isu sosial digunakan untuk berbagai aspek dan ekspresi dalam karya sastra. Kritik sosial perlu dikaji guna memahami penjelasan persoalan sosial dalam karya sastra, apa tujuan pengarang dalam karya sastra, dan bagaimana penulis kreatif pengarang menciptakan persoalan sosial dalam karya sastra.

Antologi Cerkak *Telasih Wulan September* disingkat peneliti menjadi ACTWS, sebuah karya sastra dari Purwadmadi yang menarik perhatian peneliti sebagai objek penelitian. Hal yang menarik perhatian penelitian ini adalah ACTWS mempunyai poin penting berupa kritik sosial. ACTWS menceritakan permasalahan sosial di masyarakat melalui kritik sosial yang dilakukan sastrawan. Kritik sosial yang diciptakan sastrawan yaitu kritik sosial terhadap politik. Kritik sosial yang disebutkan dalam penelitian ini

adalah kritik sosial terhadap penguasa. Kritik sosial terhadap pemerintahan dalam ACTWS mempunyai isu penting yang perlu dikaji. ACTWS bercerita tentang berbagai macam konflik antara masyarakat dan penguasa. Konflik tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang diciptakan oleh pengarangnya. Pihak berwenang pun tidak lepas dari kritik sosial yang dilontarkan penulis. Kritik sosial dimanfaatkan masyarakat sebagai bentuk ekspresi terhadap penguasa (Roesmiati, 2016). Karena itu, ACTWS punya poin menarik berupa penelitian sosiologi masyarakat melalui kritik sosial terhadap penguasa dalam sebuah antologi cerpen.

Peneliti menggunakan teori sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren. Kajian sosiologi sastra merupakan salah satu cabang ilmu yang mengkaji sosiologi dalam bentuk sosial masyarakat. Sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah yang secara objektif mengungkapkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengarang dan pembaca (Widayanti & Darni, 2022). Sosiologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji aspek sosial masyarakat dalam karya sastra. Sosiologi sastra bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sastra yang berkaitan dengan masyarakat. Sosiologi sastra juga menjelaskan permasalahan sosial dalam masyarakat melalui karya sastra. Pengarang mempunyai tujuan penulisan karya sastra dan pesan yang tersirat dalam karya sastra tersebut. Penelitian ini akan mengkaji karya sastra melalui pendekatan sastra dan masyarakat.

Pengarang menciptakan karya sastra untuk ekspresi dan menanggapi terhadap kehidupan. Karya sastra menceritakan unsur ekstrinsik yang dibangun oleh persoalan sosial. Salah satu karya sastra yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Antologi Cerkak Telasih Wulan September* terbitan tahun 2019 karya Purwadmadi. ACTWS mengangkat permasalahan sosial di masyarakat melalui kritik sosial. Kritik sosial dalam ACTWS adalah kritik sosial terhadap penguasa. Kritik sosial terhadap penguasa menjadi landasan penelitian yang penting untuk dikaji oleh peneliti. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren untuk mengkaji kritik sosial penguasa di ACTWS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis ACTWS. Rumusan masalah penelitian ini dihubungkan dengan kritik sosial dan pendekatan sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren. Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu 1) kritik politik terhadap penguasa dalam ACTWS karya Purwadmadi. Adapun tujuan penelitian adalah 1) mengetahui kritik politik terhadap penguasa dalam ACTWS karya Purwadmadi. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merumuskan judul penelitian yaitu Kritik Politik terhadap Penguasa dalam ACTWS karya Purwadmadi Kajian Purwadmadi.

Metode

Jenis pendekatan penelitian kritik sosial di ACTWS menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memahami permasalahan yang ada pada data. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan strategi penelitian yang mengkaji peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang tidak terlihat pada individu dan meminta individu untuk menggambarkan hal-hal yang tidak terlihat tersebut (Rusnadi & Rusli, 2014). Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, foto, video, kaset, dokumentasi pribadi, catatan, dan dokumentasi lainnya.

Sumber data adalah informasi yang diperoleh peneliti untuk dapat menjawab hakikat penelitian (Mekarisce, 2020). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, antara lain: 1) sumber data primer, dan 2) sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai sumber utama. Sumber data primer penelitian ini adalah cerpen berjudul *Antologi Cerkak Telasih Wulan September* karya Purwadmadi. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung data utama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian terdahulu mengenai kritik sosial dalam karya sastra. Data penelitian yang digunakan adalah cerpen dalam *Antologi Cerkak Telasih Wulan September* karya Purwadmadi. Penelitian karya sastra ACTWS dapat dilakukan terhadap data-data yang mengandung unsur kritik sosial terhadap penguasa. Data ACTWS dari 24 cerpen tersebut diambil dari 13 cerpen yang memuat kritik sosial terhadap penguasa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik membaca, menelaah, dan mencatat. Teknik membaca merupakan teknik terpenting yang digunakan dalam pengumpulan data melalui membaca. Teknik menelaah adalah suatu metode pengumpulan data melalui peninjauan suatu fungsi bahasa. Teknik membaca dan menelaah dilanjutkan dengan teknik mencatat. Teknik mencatat merupakan teknik pengumpulan data melalui pencatatan atau kutipan teks dalam ACTWS.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen kunci atau instrumen kunci yang aktif dalam penelitian (Defianti, 2020). Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data. Penelitian melalui instrumen penelitian dapat memudahkan prosedur pengumpulan data penelitian. Peneliti sebagai instrumen penelitian akan melakukan proses penelitian dari awal, yaitu mengkaji antologi cerpen karya Purwadmadi. Kemudian data-data yang ditemukan selama ACTWS akan diolah menjadi hasil penelitian kritik sosial.

Patton (Mulyadi, 2012) menjelaskan teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, cara mengumpulkan data dalam suatu pola, kategori, dan deskripsi dasar. Data penelitian ACTWS akan diklasifikasi berdasarkan kategori dan dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Peneliti akan mengidentifikasi sumber data dengan memahami kritik sosial dalam karya sastra, khususnya yang membahas tentang kritik sosial terhadap penguasa. Kemudian peneliti mengkorelasikan unsur-unsur penciptaan karya sastra pengarang menurut teori sosiologi sastra Wellek dan Warren. Peneliti dapat mengetahui hasil penelitiannya dan dapat memberikan uraian lebih lanjut, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil kritik politik terhadap penguasa di ACTWS melalui temuan analisis penelitian. Beberapa cerkak di dalam ACTWS menceritakan permasalahan sosial di masyarakat melalui kritik sosial yang dilakukan sastrawan. Kritik sosial yang diciptakan sastrawan yaitu kritik sosial terhadap politik.

1. Bentuk Kritik Politik terhadap Penguasa dalam ACTWS

Permasalahan sosial dalam bidang politik dihubungkan oleh kelompok yang mempunyai kekuasaan di suatu daerah. Persoalan politik seperti kewenangan penguasa dan konflik sosial disebabkan adanya pelanggaran terhadap etika politik penguasa berdasarkan kepentingan individu. Etika politik adalah manusia mempunyai landasan politik yang dibagi tiga hal, yaitu: 1) manusia sebagai makhluk sosial, 2) manusia dengan dinamika sosial, dan 3) Dinamika politik manusia yang tidak kasat mata (Sabilla Febriany & Anggraeni Dewi, 2021). Permasalahan politik adalah soal etika politik di kalangan masyarakat yang membentuk negara. Penguasa yang menggunakan politik buruk menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak menerima politik yang diterapkan penguasa menimbulkan kritik sosial terhadap hal tersebut.

Kritik politik terhadap penguasa ada di lingkungan ACTWS. Materi politik dalam ACTWS diciptakan Purwadmadi untuk memahami kritik sosial terhadap konflik politik, etika politik, dan dinamika politik yang buruk. ACTWS juga menyampaikan kepada pemerintah Yogyakarta bahwa menggunakan politik tidak baik. Penguasa diartikan sebagai individu yang memerintah negara. Pemerintah diharapkan oleh rakyat untuk mendirikan negara. Penguasa yang tidak bisa mendirikan negara menimbulkan masalah politik. Persoalan politik disebabkan oleh penguasa yang melanggar etika politik dan dinamika politik. Permasalahan politik yang tidak dapat diselesaikan akan menyebabkan dinamika sosial masyarakat kecewa terhadap penguasa. Masyarakat yang kecewa menggunakan kritik sosial dan politik sebagai bentuk kontrol terhadap penguasa.

a. Kedudukan dan Kekuasaan

Kedudukan dan kekuasaan merupakan alat untuk mengabdikan pada negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berdasarkan pada keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kedudukan dan kekuasaan dikatakan sebagai sarana pemerintah untuk menyelenggarakan negara (Khozin Afandi, 2015). Penguasa diberi peran untuk mengatur negara yang sejahtera. Seseorang yang mempunyai kedudukan adalah orang yang dapat mengatur negara. Jabatannya juga bisa naik derajatnya dalam anggota masyarakat. Meskipun jabatan tersebut dijelaskan sebagai yang tertinggi di pemerintahan, namun jabatan tersebut juga dapat mengarah pada urusan politik. Persoalan politik dalam jabatan ataupun kekuasaan disebabkan oleh penguasa yang tidak mampu menyejahterakan negara.

Kritik politik terhadap penguasa ada di dalam *cerkak Kembang Jeruk Kademangan*. *Kembang Jeruk Kademangan* berkisah tentang upaya politik yang digagas Demang Surandaka untuk menyatukan dua *Kademangan*. Demang Surandaka merupakan sesepuh di Kademangan Bethara mempunyai tujuan agar dua Kademangan menjadi satu. Persoalan politik ini disebabkan adanya upaya penghancuran gagasan yang diciptakan oleh Demang Surandaka. Ki Demang Surandaka menikahkan anak bungsunya bersama putri Demang Gombang. Mas Surandita adalah anak bungsu dan tidak mendapat kabar pernikahan dari Rara Sedhah sebagai putri Demang Gombang. Suami Rara Sedhah gugur membela Kademangan Gombang dalam pertempuran, akhirnya Kademangan Gombang mengalami kekosongan kekuasaan. Ki Demang Surandaka yang memahami perasaan Rara Sedhah memberikan sikap politik. Sikap politiknya adalah mengupayakan dua kerajaan menjadi satu yang diharapkan tidak bisa

dihancurkan dan kuat terhadap serangan kerajaan lain. Penjelasananya terdapat pada data 01 yaitu:

Data 01

Ki Demang Surandaka mendel sawetara. Unjal ambegan banjur ngendika ririh raras. “Surandita. Ngertiya, Trenggona wis nyawiji karo Gombang. Kowe ya ngerti, Adhi Mertadigda ora kagungan putra kakung. Rara Sedhah bakal dadi bojomu. Lha, Bethara, Trenggona, lan Gombang ikuh amung duwe kowe sawiji. Kakungmu padha ora gelem gumanti ing Bethara. Mula aku arep rembugan karo Adhi Mertadigda. Kepriye carane yen Gomblang, Benthara lan Trenggona nyawiji banjur kowe kang madeg Demang. Yen binerkahan ing Pangeran, isa madeg dadi Kadipaten.” (Kembang Jeruk Kademangan, 2019: 85)

Terjemahan

Ki Demang Surandaka berhenti sejenak. Menghela nafas lalu mengatakan gagasannya secara halus. “Surandita. Mengertilah, Trenggona sudah menyatu dengan Gombang. Kamu ya tahu, Adik Mertadigda tidak memiliki putra. Rara Sedhah akan menjadi istrimu. Lha, Bethara, Trenggona, dan Gombang itu hanya tinggal kamu sendiri. Putranya sudah tidak mau menggantikan di Bethara. Mulai sekarang aku mau diskusi dengan Adik Mertadigda. Bagaimana caranya jika Gombang, Bethara, dan Trenggona menyatu lalu kamu yang menjadi Demang. Kalo diberkati oleh Tuhan, bisa berdiri jadi Kadipaten.” (Kembang Jeruk Kademangan, 2019: 85)

Kutipan data 01 menjelaskan Ki Demang Surandaka menjelaskan keadaan Kademangan. Mas Surandita tidak bisa menikahi Rara Sedhah karena telah bercerai mati dan sudah menikah dengan pria lain. Demang Surandaka tidak putus asa, dia mengatakan Surandita harus rela menikah untuk mendapatkan kedudukan di Kademangan Benthara. Politik di Kademangan Benthara lagi beruntung karena kekuasaan di Kademangan Gombang sedang kosong. Demang Surandaka berdiskusi dengan Adhi Mertadigda untuk mencoba menjadikan tiga kademangan menjadi satu kademangan. Jika Surandita menikah dengan Rara Sedhah, Surandita bisa menjadi Demang atau bisa membangun kadipaten baru. Kadipaten baru dapat menciptakan kekuatan politik baru di daerah tersebut.

Politik Benthara dari data 01 dijelaskan sebagai politik yang memanfaatkan anggota keluarga sebagai interaksi antar penguasa. Demang Surandaka memahami belum stabilnya situasi politik pada masing-masing tiga kademangan tersebut. Suami Rara Sedhah tewas dalam peperangan menyebabkan ketiga kademangan tidak bisa hidup damai bersama. Demang Surandaka dari Kademangan Benthara sedang mengupayakan anaknya untuk menjadi pengganti demang di Kademangan Gombang. Demang yang bisa melanjutkan kepemimpinan Mas Kertawangsa yang gugur membela tiga kademangan. Persoalan politik inilah yang menyebabkan ketiga kademangan tersebut mengalami kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan menimbulkan perpecahan dari tiga kademangan yang sudah menyatu. Penyatuan kembali kademangan tersebut menjadi kewajiban. Konflik yang menyebabkan ketiga kademangan tersebut harus bersatu terdapat pada data 02, yaitu:

Data 02

“Ya Mas Kertawangsa kae gugur ing palagan. Tumbal tumrap sasape Gombang, gawe Demang Trenggona teluk banjur gelem manunggal ing

Kademangan Gombang. Emane, Mas Kertawangsa tiwas.” (Kembang Jeruk Kademangan, 2019:84)

Terjemahan

“Ya Mas Kertawangsa tersebut gugur dalam pertempuran. Tumbal terhadap penerobos Gombang, membuat Demang Trenggona mengalah lalu mau menyatu kepada Kademangan Gombang. Kasihannya, Mas Kertawangsa tewas.” (Kembang Jeruk Kademangan, 2019:84)

Kutipan pada data 02 menjelaskan bahwa Mas Kertawangsa gugur dalam pertempuran tersebut sehingga menyebabkan kekuasaan Gombang kosong. Mas Kertawangsa mempunyai harapan bahwa tiga Kademangan akan menjadi satu. Wilayah Trenggona telah ditaklukkan oleh Mas Kertawangsa. Konflik yang menyebabkan Mas Kertawangsa tumbang dan tidak ada lagi yang terus berkuasa. Demang Surandika takut Kademangan Trenggona terpecah dan bermusuhan kembali terpecah menjadi dua Kademangan. Demang Surandika kemudian menawarkan putranya untuk menggantikan Mas Kertawangsa. Upaya mencari pengganti Mas Kertawangsa ada pada data 01. Kutipan tersebut yang menyebutkan Demang Surandika mengharapkan Surandita agar menjaga perdamaian di tiga kademangan. Permasalahan politik dalam cerkak Kembang Jeruk Kademangan menjelaskan ketidakstabilan kekuasaan di dalam tiga Kademangan. Kekuasaan yang kosong menjadi kerugian politik bagi ketiga wilayah tersebut. Seharusnya para demang bisa mencari pengganti yang cocok, terutama yang telah dilakukan Demang Surandika. Kekuasaan yang kosong berujung pada pertarungan tiga kademangan, ini yang tidak diinginkan oleh Demang Surandika dan Surandita.

Data 01 dan data 02 menjelaskan adanya perebutan kekuasaan akibat ketidakstabilan politik. Demang Surandika mempunyai tujuan menjadikan politik tiga kademangan dapat stabil. Upaya menyatukan ketiga kademangan tersebut dilakukan dengan pernikahan antar bangsawan kademangan. Politik pernikahan ada di negara yang berbentuk monarki. Hal tersebut dalam cerpen Kembang Jeruk Kademangan merupakan unsur ningrat dalam pemerintahan. Dinasti politik bertujuan negara yang bersatu dengan negara lain melalui darah bangsawan. Konsep ini terkait dengan cara penguasa berinteraksi dengan penguasa lainnya. Unsur ningrat bisa menyelesaikan masalah kekuasaan kosong, tapi tidak semua bangsawan bisa memberikan solusi. Jika kedudukan kaum bangsawan tidak dapat bertahan dalam suatu negara, maka negara tersebut dapat terpecah belah dan menimbulkan peperangan. Peperangan yang disebabkan oleh gagalnya kedudukan bangsawan. Proses penghancuran kedudukan ningrat terdapat dalam cerkak Kembang Jeruk Kademangan. Kutipannya ada pada data 03 yaitu:

Data 03

“Kok ngerigke prajurit semanten kathahe, ta Pak?”

“Ana kraman.”

“Kraman?” pitakone Surandita.

“Ponakane Demang Trenggona, ngrabasa Gombang.”

“Ngrabasa?”

“Iya, mbarang amuk mlebu kademangan, nedya gawe patine Adhi Mertadigda.”

(Kembang Jeruk Kademangan, 2019:86)

Terjemahan

“Kok mengerahkan prajurit sebanyak ini, Pak?”

“Ada pemberontakan.”

“Pemberontak?” tanya Surandita.

“Keponakannya Demang Trenggona, merusak Gombang.”

“Merusak?”

“Iya, semua diamuk dalam kademangan, niat buat membunuh Adhi Mertadigda.” (Kembang Jeruk Kademangan, 2019:86)

Data 03 menggambarkan peperangan yang diakibatkan oleh pemberontakan dalam tiga kademangan. Demang Surandika tak ingin ada kejadian meninggalnya Mas Kertawangsa dalam tiga kademangan. Demang Surandika kemudian memerintahkan para prajurit berangkat ke Gombang. Demang Surandika mendapat kabar adanya pemberontakan yang menyebabkan pecahnya ketiga kademangan Mas Kertawangsa. Pemberontak pada data 03 merupakan keponakan Demang Trenggona. Pemberontakan tersebut berhasil diketahui karena adanya rencana pembunuhan Adhi Mertadigda. Data 01 menjelaskan Adhi Mertadigda bersedia membahas persoalan tiga kademangan untuk menjadi satu kekuatan baru. Keponakan Demang Trenggona tidak terima dan berencana membunuh Adhi Mertadigda. Demang Surandika kemudian menumpas pemberontakan yang tidak menerima Rara Sedhah menikah dengan Surandita. Pemberontakan disebut sebagai bentuk politik yang tidak sejalan dengan gagasan penguasa lain.

Cerkak Kembang Jeruk Kademangan menjelaskan peran kekuasaan dan kedudukan di dalam ACTWS. Konflik yang klimaksnya adalah persoalan politik yang tidak baik bagi negara. Negara membutuhkan kekuasaan yang stabil untuk menyediakan kondisi yang damai. Penguasa yang tidak mampu menyelesaikan persoalan kekuasaan akan menyebabkan negaranya terpecah belah. Hal ini dijelaskan dalam cerkak Kembang Jeruk Kademangan. Kekosongan kekuasaan di Gombang menyebabkan pecahnya perang, jika tidak ada pengganti kekuasaan yang sedang berkuasa. Seorang pemimpin yang baik akan berdiskusi bersama siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.

Cerkak ini berkaitan dengan reaksi masyarakat Yogyakarta pada tahun politik. Kekuasaan digunakan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu negara, namun tidak didasarkan pada perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan menjadi sorotan masyarakat Yogyakarta pada tahun-tahun politik. Sri Sultan Hamengku Buwono X mempunyai harapan pada pemilu untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, bukan hanya kegiatan politik yang berdasarkan perebutan kekuasaan (Razak, 2023). Pemilu tidak digunakan untuk mengisi kekuasaan yang kosong, melainkan titik tolak suatu negara yang mampu mewujudkan martabat, perdamaian, dan keadilan. Politik buruk adalah politik yang menyebabkan perpecahan pemerintahan. Cerkak Kembang Jeruk Kademangan mengisahkan para demang yang sedang berebut kekuasaan di pemerintahan.

b. Disorganisasi dalam Pemerintahan

Negara yang stabil adalah negara yang memiliki struktur anggota pemerintahan yang aktif mengatur negara. Negara yang baik di dalam organisasi diartikan sebagai *good governance*. Penguasa harus menata bersama-sama dan menghubungkan semua kepentingan dari pemerintah atau masyarakat. Penguasa yang dapat *good governance* mengakibatkan organisasi yang ditata dengan baik, tetapi praktik manajemen yang tidak

baik mengakibatkan disorganisasi pemerintahan (Syairozi et al., 2021). Para penguasa akan gotong royong memerintah negara hingga sejahtera. Penguasa membutuhkan struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Organisasi juga akan membangun negara yang aman. Penguasa menggunakan para anggota pemerintahan sebagai pembantu menata negara. Meskipun penguasa mampu berorganisasi, tetapi tidak semua struktur pemerintahan bisa diajak diskusi. Disorganisasi juga ada di dalam pemerintah. *Disorganisasi* di dalam pemerintah dapat menyebabkan jalannya birokrasi menjadi berhenti (Permatasari, 2020, p. 35). Pemerintah yang tidak berjalan bersama-sama menyebabkan permasalahan politik. Penguasa perlu mencegah hal yang bisa menyebabkan disorganisasi di dalam pemerintah.

Cerkak yang ada *disorganisasi* pemerintah adalah Benggol Begal. Cerkak Benggol Begal menceritakan Kanjeng Adipati yang lagi memiliki pemberontakan. Cerkak ini berhubungan dengan permasalahan politik, ekonomi, dan moral di dalam peristiwa yang terjadi. Politik di dalam cerkak diartikan sebagai penyebab pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang seharusnya diselesaikan malah menjadi masalah besar yang mengakibatkan dua aspek. Dua aspek tersebut adalah ekonomi dan moral. Politik yang baik adalah politik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lewat kedudukan penguasa. Cerkak Benggol Begal mengisahkan Kanjeng Adipati lagi meributkan permasalahan terhadap para demang. Pemerintahan tersebut terjadi kesalahan komunikasi hingga permasalahan tidak diurus. Ini dibuktikan pemberontakan tidak bisa ditumpas oleh demang yang diperintahkan. Kutipan tersebut ada di dalam data 06, yaitu:

Data 06

Mula banjur utusan Demang Secayuda gawe pasang giri patembaya, sapa bisa beberat reretu ing Gunung Kimpul bakal sinengakake gumanti kalenggahan Demang Pucanganom. Ki Secayuda kang pinercaya dening Kanjeng Adipati Digdahadiningrat, ora nuli tumindak. Ki Secayuda miterang luwih dhisik marang Kanjeng Adipati. (Benggol Begal, 2019: 53)

Terjemahan

Mulai dari utusan Demang Secayuda membuat kabar pasang badan, siapa bisa menumpaskan pemberontakan di Gunung Kimpul akan diberikan penggantian kedudukan Demang Pucanganom. Ki Secayuda yang kepercayaan dari Kanjeng Adipati Digdahadiningrat tidak melakukan tindakan. Ki Secayuda menjelaskan lebih jelas kepada Kanjeng Adipati. (Benggol Begal, 2019: 53)

Data 06 menjelaskan konflik vertikal di dalam pemerintahan. Konflik vertikal tersebut yaitu Adipati kepada Demang. Kanjeng Adipati tidak setuju hasil yang dijelaskan dari Demang Secayuda. Permasalahan politik di dalam data 06 dilihat Demang Secayuda tidak melakukan aturan yang diperintahkan oleh Kanjeng Adipati. Pemberontak yang harus ditumpas tidak dilakukan oleh Demang Secayuda. Struktur pemerintah yang tidak berjalan bersama mengakibatkan permasalahan besar. Permasalahan besar disebabkan oleh disorganisasi di dalam pemerintah. Cerkak Benggol Begal mengisahkan Demang yang tidak patuh terhadap penanggung jawabnya yaitu Kanjeng Adipati. Penguasa yang tidak melakukan apa yang diperintahkan atasannya menyebabkan pemberontak yang membahayakan negara. Pemberontak yang menyebabkan aneka macam permasalahan di dalam negara. Ini yang tidak diinginkan

oleh Kanjeng Adipati, tetapi Demang Secayuda tidak melakukan perintah Kanjeng Adipati tersebut.

Penguasa tidak bisa menata negaranya sendiri, penguasa perlu bagan yang membantu di dalam pemerintahan. Penguasa membentuk struktur pemerintahan yang bisa membangun negara harmonis. Penguasa menggunakan politik bersifat kolektif untuk bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan cara bersama-sama. Pemerintah yang gagal di dalam data 06 yaitu pemerintah yang tidak bisa memerintah bersama-sama di dalam struktur pemerintahan. Adipati dan Demang harus menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jika Demang tidak bisa melaksanakan yang diperintahkan Adipati, struktur pemerintah yang tidak harmonis menyebabkan permasalahan besar. Pemerintah yang baik adalah struktur pemerintah yang memerintahkan bersama-sama. Pemerintahan harus berhubungan antara bawahan dan atasan, contohnya di dalam cerkak Benggol Begal yaitu Demang Secayuda dan Kanjeng Adipati.

Cerkak Bengol Begal menjelaskan keadaan kadipaten yang tidak damai disebabkan oleh disorganisasi pemerintah. Kondisi kadipaten yang tidak tenang dikarenakan pemberontak di lereng Gunung Kimpul tidak ditumpas dengan cepat. Pemberontak menimbulkan masalah besar di Kadipaten, terutama masalah yang menyangkut ekonomi. Para pemberontak melakukan penjarahan kegiatan perdagangan. Perampokan tersebut menyebabkan aktivitas perekonomian terhenti. Ini adalah permasalahan besar yang menghubungkan masyarakat dan negara. Masyarakat bisa khawatir karena pemerintah tidak tanggap terhadap situasi perampok. Disorganisasi dalam pemerintahan dapat menimbulkan kondisi yang tidak damai, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Pemberontak yang menjarah perdagangan tersebut tercantum dalam 17 data, yaitu:

Data 17

Demang Pucanganom nyaguhi sawise wulan Pasa, nanging Kanjeng Adipati ngersake reretu wus tinumpes ing sasi Ruwah. Retu begal iku jejarah rayah lakune para kawula kang mersudi laku dagang seka Pasar Semanu tumuju Pasar Baran lan Praci. Kanjeng Adipati dhawuh, para among dagang bisa kalis saka durakane laku culika bebegal ing marga perenging Gunung Kimpul, tlatah Kademangan Pucanganom. (Benggol Begal, 2019:53)

Terjemahan

Demang Pucanganom menindak sesudah bulan puasa, tetapi Kanjeng Adipati menginginkan pemberontak sudah ditumpas di waktu Ruwah. Pemberontak begal itu menjarah semua dagangan para warga yang ingin berdagang dari Pasar Semanu menuju Pasar Baran dan Praci. Kanjeng Adipati memerintahkan, para dagang bisa lolos dari kedustaan pelaku begal di jalan lereng Gunung Kimpul, berlokasi Kademangan Pucanganom. (Benggol Begal, 2019:53)

Data 17 menjelaskan permasalahan ekonomi yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Para pemberontak tidak bisa ditinggalkan karena begal akan merusak kegiatan pasar di waktu Ruwah. Kanjeng Adipati khawatir para perampok akan menyebabkan permasalahan ekonomi. Kondisi kegiatan pasar dijelaskan tidak memungkinkan berjalan dengan baik. Kanjeng Adipati memberi perintah agar para begal itu dibasmi sebelum waktu Ruwah. Waktu Ruwah dianggap penting bagi Kanjeng Adipati karena mahalnya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang mahal dan kegiatan

perekonomian yang tidak berjalan menimbulkan permasalahan ekonomi politik di Kadipaten.

Cerkak Benggol Begal menjelaskan kegiatan pasar yang tidak bisa berjalan karena disorganisasi pemerintah. Para pemberontak dalam cerkak Benggol Begal diartikan kegiatan yang membahayakan masyarakat. Masyarakat yang ingin berdagang di Kadipaten tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi yang tidak berjalan dapat menyebabkan hilangnya penghidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan permasalahan ekonomi dalam politik Kadipaten. Data 17 menunjukkan bahwa waktu Ruwah merupakan suatu hal yang penting untuk kegiatan pasar. Adipati memberi perintah kepada para Demang untuk menghancurkan pemberontak di Gunung Kimpul sebelum bulan Ruwah. Bulan Ruwah merupakan bulan dimana pangan merupakan kebutuhan yang mahal untuk masyarakat. Walaupun Demang telah diperintahkan untuk memusnahkan pemberontak begal, namun peraturan yang diterapkan tidak digunakan untuk memusnahkan pemberontak begal. Para Demang menggunakan kabar melindungi diri, hal ini membuat keadaan kadipaten semakin rusuh karena perampok akan menjarah apa saja. Kutipan ini ada pada data 18 yaitu:

Data 18

Kabar pasang giri patembaya wis sumebar. Wus tartemtu, para penggawe reretu ing Gunung Kimpul lan Demang Pucanganom mireng kabar pasang giri iku. Nanging, para telik sandi kang disebar dening Demang Secayuda durung ana kang caos palaporan bab tanggap sambunge Demang Pucanganom. Malah para begal ing Gunung Kimpul saya sereng tumindake. Ora hamung laku bebegal nyegat para kang lampah dagang ing marga-marga, nanging uga njarah rayah bandhane warga wujud raja brana lan raja kaya. Malah banjur kepara tegel gawe rajapati. (Benggol Begal, 2019:55)

Terjemahan

Kabar pasang badan sudah tersebar. Sudah pasti, para pemberontak di Gunung Kimpul dan Demang Pucanganom mendengar kabar melindungi diri itu. Akan tetapi, para pengamat musuh yang disebar oleh Demang Secayuda belum ada yang memberikan laporan dari Demang Pucanganom. Malah para begal di Gunung Kimpul tambah sadis tindakannya. Tidak hanya menjarah dagangan di jalan, tetapi juga merampok kekayaan warga miskin dan kaya. Malah lanjut tidak merasa iba untuk membunuh seseorang. (Benggol Begal, 2019:55)

Data 18 menjelaskan permasalahan perampok yang merampok harta yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Para Demang menyebarkan kabar melindungi diri untuk menghancurkan para perampok. Upaya itu dimanfaatkan Demang untuk menuntaskan pemberontakan di Gunung Kimpul. Kemudian aparat memberikan kondisi damai di lingkungan masyarakat. Meski kabar tersebut sudah tersebar, namun hal tersebut tidak mampu memusnahkan para perampok yang diperintah oleh Kanjeng Adipati. Para bandit bahkan menjarah harta benda masyarakat. Permasalahan yang tadinya berkaitan dengan kegiatan pasar, kini para pemberontak berani menjarah harta rakyat. Hal inilah yang menyebabkan keadaan semakin kacau karena melibatkan masyarakat secara langsung.

Para bandit pada data 18 digambarkan sebagai pihak yang merusak perekonomian dan negara, namun pihak berwenang tidak bisa menyelesaikannya bersama-sama.

Permasalahan ekonomi dalam cerkak Benggol Begal disebabkan oleh disorganisasi antara Demang dan Adipati. Pemberontak menggunakan penjarahan untuk menghancurkan perekonomian negara. Masyarakat akan takut dan khawatir di daerah tersebut. Kekhawatiran masyarakat dapat menyebabkan aktivitas perekonomian terhenti. Meski perintah untuk menumpas bandit tersebut akan dilakukan oleh para Demang, namun upaya mereka menyebabkan situasi Kadipaten semakin kacau. Para perampok menjarah harta rakyat, lalu para perampok melakukan pembunuhan untuk menghancurkan negara yang damai. Data 18 menggambarkan perekonomian dan organisasi pemerintahan ada kaitannya dengan negara sejahtera. Organisasi yang baik dalam pemerintahan menyebabkan lancarnya kegiatan perekonomian. Lancarnya aktivitas perekonomian disebabkan banyaknya pedagang yang berdagang ke daerah tersebut. Maka daerah yang damai bisa membangun negara yang sejahtera.

c. Dinamika Sosial Politik yang tidak baik di dalam Negara

Dinamika sosial pemerintah berkaitan dengan interaksi sosial individu dengan masyarakat, bagaimana pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat. Sementara dinamika politik pada manusia dapat menata masyarakat, yaitu praktik politik di negara sendiri (Sabilla Febriany & Anggraeni Dewi, 2021). Dinamika sosial dan politik merupakan hal penting dalam cara pemerintah menyelenggarakan negara. Interaksi sosial dalam politik akan berubah setiap harinya. Pemerintah harus memahami dinamika sosial dan politik yang berada di masyarakat. Apa yang perlu dan yang tidak perlu diterapkan ataupun dicegah oleh pemerintah. Pemerintah harus memahami kondisi dinamika sosial masyarakat. Pemerintah juga dapat memahami kondisi politik yang dinamis. Penguasa yang tidak memanfaatkan dinamika sosial dan politik dengan baik dapat menimbulkan permasalahan politik. Dinamika sosial dan politik yang buruk menyebabkan negara dapat dihancurkan oleh penguasa.

Dinamika politik yang menghancurkan negara dapat ditemukan dalam cerkak Dlingo Pareden. Dlingo Pareden menjelaskan praktik politik Adipati Batarana yang tidak benar. Praktik politik yang diterapkan Adipati Branata menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap bangsawan Kadipaten Batarana. Cerkak Dlingo Pareden menceritakan praktik politik Adipati dan ketidakpercayaan Pangeran Sepuh. Pangeran Sepuh adalah bangsawan yang tidak percaya kepada pemerintahan Adipati Batarana. Kepercayaan terhadap pemerintah dapat membawa perdamaian di negara, terutama di kalangan bangsawan. Bangsawan yang tidak percaya pada Adipati menyebabkan perang yang bertujuan untuk merebut posisi kedudukan penguasa. Kutipan ketidakpercayaan ini ada pada data 09 yaitu:

Data 09

Kanjeng Pangeran Sepuh temene digadhang lenggah ing Kadipaten pinangka parampara lan pamengku adat. Kanjeng Adipati Batarana sedya jumenengake Pangeran Sepuh pinangka Lurah Pangeran ngiras pantes nujum Kadipaten. Nanging Pangeran Sepuh ora kersa kanthi pawadan, Adipati Batarana wis ora teges, ora pantes disepuhi maneh. Rayine anggone mbawat Batarana wis cengkah saka wulang luhur. Mesthi wae Kanjeng Adipati duka, banjur nundhung Pangeran Sepuh. (Dlingo Pareden, 2019:65)

Terjemahan

Kanjeng Pangeran Sepuh diperkirakan menduduki di Kadipaten sebagai juru kunci dan pemangku adat. Kanjeng Adipati Batarana sedia menamakan

Pangeran Sepuh sebagai Lurah Pangeran cocok memerintah pada Kadipaten. Akan tetapi Pangeran Sepuh tidak menindak secara serius, Adipati Batarana sudah tidak tegas, tidak pantas dihormati lagi. Saudaranya memerintah Batarana sudah menyimpang dari ajaran luhur. Selalu saja Kanjeng Adipati nafsu, lalu membuat Pangeran Sepuh keluar. (Dlingo Pareden, 2019:65)

Data 09 menjelaskan tentang apa yang menyebabkan Pangeran Sepuh tidak percaya kepada Adipati Batarana. Konflik yang dikatakan Adipati tidak sesuai dengan dinamika politik di kadipaten. Kadipaten Batarana menimbulkan konflik pemerintahan akibat rasa nafsu Adipati. Nafsu diartikan sebagai suatu hal yang celaka bagi ajaran luhur. Meskipun Kanjeng Pangeran Sepuh diberi jabatan di Kadipaten, namun Kanjeng Pangeran Sepuh memilih untuk tidak menduduki jabatan tersebut. Sebab, Pangeran Sepuh tidak percaya atau kecewa dengan sikap Adipati Batarana. Dinamika politik yang tidak baik menyebabkan terputusnya interaksi sosial di dalam pemerintahan.

Kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial dalam politik. Dinamika sosial penguasa merupakan interaksi sosial yang baik dimanfaatkan oleh penguasa. Data 09 menggambarkan dinamika sosial Adipati yang tidak disetujui oleh Pangeran Sepuh. Hal ini menjelaskan adanya hubungan dinamika sosial dan politik terhadap perilaku penguasa. Perilaku penguasa yang tidak disetujui perlu diperbaiki sesuai ajaran luhur daerah tersebut. Pihak berwenang harus memahami apa yang salah dalam mendirikan negara. Meskipun Adipati didefinisikan sebagai otoritas tertinggi, Adipati harus memperbaiki keadaan sosial politik tanpa alasan lain. Dinamika sosial dan politik yang tidak baik di pemerintahan menimbulkan permasalahan politik yang lebih besar. Permasalahan tersebut bisa berujung pada perang antar bangsawan atau penguasa. Hasil dinamika sosial politik Adipati Batarana terdapat pada data 10, yaitu:

Data 10

“Kakang Pangeran Sepuh. Andika sampun ngirit kawula, arsa ngrabasa panguwaos Batarana. Tindak laku nglundara hamung kangge samudana anggernira weh pambujuk pamituting kawula. Temenipun andika arsa ngrebat kalenggahan kula,” ngendika Kanjeng Adipati. (Dlingo Pareden, 2019:67)

Terjemahan

“Kakak Pangeran Sepuh. Anda sudah menghentikan warga, lalu merebut penguasa Batarana. Tindakan perlarian cuma untuk ujar manis bagi pembujuk kabar saya. Benarkan Anda ingin merebut kedudukan saya,” ujar Kanjeng Adipati. (Dlingo Pareden, 2019:67)

Data 10 menyebutkan bahwa Adipati Batarana tidak menyetujui kedatangan Pangeran Sepuh ke Kadipaten. Adipati Batarana tidak terima dengan apa yang diucapkan Pangeran Sepuh. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial politik yang kurang baik. Adipati mengira Pangeran Sepuh datang untuk merebut kekuasaan Kadipaten. Meskipun Adipati membawa prajurit untuk menangkap Pangeran Sepuh, namun Pangeran Sepuh tidak mempunyai jawaban dan menyadari bahwa Kadipaten berada dalam reruntuhan. Kondisi kadipaten hancur karena ada yang membujuk Adipati untuk melawan Pangeran Sepuh. Dhata 09 juga mengatakan bahwa Adipati harus nafsu sehingga tanpa sadar menghancurkan Kadipaten. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial politik yang tidak dapat diterapkan dengan baik oleh penguasa.

Penguasa yang menghancurkan ajaran luhur menimbulkan berbagai macam permasalahan. Ajaran luhur diartikan sebagai dinamika sosial dan politik yang berkaitan dengan tata cara mendirikan negara. Data 10 menceritakan kisah Adipati yang tidak menerima kedatangan Pangeran Sepuh di Kadipaten Batarana. Dinamika sosial politik adalah cara pemerintah mengatur negara melalui interaksi sosial. Dinamika sosial dan politik harus bisa diterapkan hingga baik oleh penguasa. Penguasa hendaknya melakukan interaksi sosial yang tidak mengarah pada persoalan politik. Penguasa harus mampu memerintah negara yang adil dan damai, serta mampu menahan nafsu dalam membangun negara. Penguasa yang mengikuti ajaran luhur akan menghasilkan dinamika sosial dan politik yang damai. Dinamika sosial dan politik yang membahayakan negara menimbulkan permasalahan besar.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kritik sosial penguasa dalam ACTWS dari kajian sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren. Penjelasan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kritik politik terhadap penguasa merupakan kritik sosial yang terpenting dalam ACTWS. Kritik politik berkaitan dengan tiga kritik sosial yang ada di ACTWS. Kritik sosial yang berkaitan dengan politik adalah kritik ekonomi, kritik moral, kritik budaya yang menyimpang dari penguasa yang ada di ACTWS. Kritik politik terhadap pemerintah dalam ACTWS adalah kritik terhadap kedudukan dan kekuasaan, disorganisasi dalam pemerintahan, dan dinamika sosial dan politik yang tidak baik dalam pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Adiyanti, R. M., & Agustiningsih, D. D. (2021). Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Negeri Terluca Karya Saut Situmorang. *Jurnal Bahtera Sastra Indonesia*, 3(1).
- Andani, N. S., Raharjo, R., & Indarti, T. (2022). Kritik Sosial dan Nilai Moral Individu Tokoh Utama dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(1).
- Defianti, D. D. (2020). Permasalahan Sosial dalam Karya Sastra. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pembelajarannya*, 4(2), 321–330.
- Khozin Afandi, A. (2015). Konsep Kekuasaan Michel Faucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149>
- Lutfiana Mayang Sumarti, & Nursaid Nursaid. (2023). Nilai Sosial Dalam Novel Layangan Putus Karya Mommy Asf. *Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Bahasa*, 1(1), 175–183. <https://doi.org/10.59024/simpati.v1i1.77>
- Mar'atus, N., & Supratno, H. (2023). Kritik Sosial Dalam Novel Senandung Bisu Karya Aguk Irawan Mn : *Kajian Sosiaologi Sastra*. 10, 189–202.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian

Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>

- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71–80. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.99>
- Razak, A. H. (2023). Sultan HB X: Pemilu Bukan Sekadar Ajang Perebutan Kekuasaan. *Harian Jogja*.
- Roesmiati, D. (2016). Latar Sosial Masyarakat Indonesia dalam Naskah Drama Cuma Soal Cabe Karya Ilham Zoebazary. *LOA: Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan*, 11(1), 71–82.
- Rusnadi, & Rusli, M. (2014). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1–13.
- Sabilla Febriany, F., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 690–695. <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i04.139>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 978–623.
- Widayanti, A., & Darni, D. (2022). Pendidikan dalam Antologi Cerkak Puspa Laksita Karya Asti Pradnya Ratri (Kajian Sosiologi Sastra). *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 18(1), 228–247. <https://doi.org/10.26740/job.v18n1.p228-247>